

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahasiswa adalah kelompok sosial masyarakat yang mempunyai kapasitas intelektual untuk memahami kondisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena mahasiswa adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan lebih mengenyam pendidikan, sehingga kemampuan berpikir kritis banyak dimiliki kalangan ini. Sikap kritis dalam diri mahasiswa tidak terlepas dari kondisi negara serta pemerintah yang sedang berkuasa, keresahan sosial serta dampak dari kebijakan pemerintah akan menjadi sorotan mahasiswa. Kekuasaan akan selalu diawasi dan dikritisi oleh mahasiswa, sedangkan representasi dari kekuasaan ialah pemerintahan dalam suatu negara (Indrayana, 2011: 5).

Keresahan sosial yang dimaksud biasanya berawal dari kesejahteraan rakyat, sedang kebijakan pemerintah harus bertujuan mensejahterakan rakyat. Tujuan dan tugas pemerintah terhadap rakyatnya ialah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam keseluruhan dan dalam arti yang seluas-luasnya (Prodjodikoro, 1981: 31). Ketika kesejahteraan belum tercapai maka sikap kritis mahasiswa akan selalu berbuah pergerakan mahasiswa, disinilah pemerintah dituntut untuk mampu mengakomodir aspirasi mahasiswa, karena aspirasi yang tidak tertampung biasanya mengakibatkan tindakan yang anarkis dari aksi demonstrasi mahasiswa.

Gerakan mahasiswa biasanya berupa sikap mengkritik atau menolak yang direpresentasikan dalam bentuk tulisan ataupun aksi demonstrasi melalui wadah organisasi terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan mahasiswa sebagai agen kontrol sosial, diibaratkan seperti sebuah lonceng besar yang setiap waktu dapat berbunyi dengan sangat keras untuk mengingatkan dan menyadarkan pihak lain ketika mereka sedang lupa diri. Mereka harus terus memantau setiap proses perubahan yang sedang berjalan, agar arah dan tujuan perubahan yang dicitakan tidak melenceng dari tujuan awal.

Dalam posisinya sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa harus bertindak objektif, logis, rasional, dan proporsional agar dapat melakukan *justifikasi* obyektif terhadap setiap persoalan yang terjadi dengan mengambil posisi penengah/pengontrol situasi dan keinginan masyarakat, aktivitas pergerakan mahasiswa dilihat pula sebagai salah satu ukuran kepuasan masyarakat. Mahasiswa yang mengambil posisi kontrol sosial tentu saja harus mempunyai konsensus bersama guna memahami masyarakat melalui kajian-kajian intern tiap organisasi pergerakan mengenai format Indonesia masa depan untuk kemudian menggiring ke arah tersebut.

Format ini akan menjadi semacam visi besar mahasiswa yang harus ditegaskan kepada seluruh pelaku politik. Dalam *mainframe* inilah mahasiswa dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosialnya dengan menggunakan *mass power* dan *institutional power* yang dimilikinya. Kontrol sosial yang dilakukan yakni berkaitan dengan segala hal yang terjadi di Indonesia, terutama yang berhubungan tentang tindakan atau kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Menurut Nasution dalam bukunya *Demokrasi Konstitusional*, demokrasi adalah nilai-nilai dan norma-norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nasution, 2011: 5). Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan), setelah adanya proses pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Darmawan, 2009: 1). Penguasa utama dalam negara demokratis adalah pemilik kuasa : rakyat (Indrayana, 2011: 9). Negara yang demokratis akan mengakomodir gerakan mahasiswa menjadi salah satu aspirasi rakyat karena mahasiswa merupakan salah satu komponen rakyat.

Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Gerakan mahasiswa merupakan suatu sikap yang terhimpun dalam organisasi. Organisasi ini terdiri dari mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota di

dalamnya. Salah satu organisasi pergerakan mahasiswa tertua di Indonesia adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI bermula dari Yogyakarta, berawal dari beberapa kalangan mahasiswa diprakarsai oleh lafran pane seorang mahasiswa STI yang menyadari akan kebutuhan rohani dari tiga kampus besar dikota pelajar tersebut yaitu Sekolah Tinggi Teknik (STT), Sekolah Tinggi Islam (STI), dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Berdiri 14 Rabiulawal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947 (Sitompul, 1994: 11-12).

HMI merupakan organisasi yang telah lama berdiri, banyak hal yang telah dilakukan dalam mengikuti jejak langkah Bangsa Indonesia. HMI lahir tanpa campur tangan pihak manapun, dicetuskan oleh mahasiswa sendiri. Organisasi ini lahir di ruang kuliah, di tengah semangat kebangsaan yang tinggi. Politik, sosial, ekonomi, agama dan kebudayaan turut mematangkan keberadaannya di tengah-tengah bangsa.

HMI yang telah lama menjadi organisasi pergerakan terus berkembang menjadi organisasi besar, memiliki jaringan luas dari daerah hingga nasional, dengan berbagai cabang di hampir tiap kabupaten/kota dan dengan umur yang sudah puluhan tahun berkecimpung didunia pergerakan mahasiswa, HMI kini sudah memiliki alumni yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan perannya masing-masing. Banyak alumni HMI yang mendapat peran penting dalam dunia pemerintahan. Baik sebagai elit pusat maupun daerah. Sekarang siklus kembali berputar. Alumni HMI yang sudah berperan dalam lingkup pemerintah tersebut tentunya akan dikawal juga oleh HMI yang masih aktif sebagai mahasiswa.

Kondisi demikian dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. HMI sebagai organisasi kader tidak hanya berkutat pada perdebatan soal konsep dan ideologi. Tetapi juga bergerak melakukan perbaikan moral bangsa. Tantangan HMI sebagai sosial kontrol adalah melawan runtuhnya integritas moralitas dikalangan elit bangsa. HMI memiliki peran penting untuk menyelamatkan bangsa dari keruntuhan moral yang bisa menjadikan bangsa ini ambruk.

Pada 1960-an, HMI dihadapkan dengan pengaruh komunisme yaitu ideologi yang bertolak belakang dengan HMI. Dampak dari perbedaan ideologi yang sangat kuat antara pemahaman anti Tuhan dari dasar filsafat komunis dengan pemahaman keislaman dari organisasi HMI menjadikan PKI dan HMI selalu dalam posisi berseberangan. Pertengahan tahun 1965 saat PKI kembali menjadi partai yang besar, perseteruan dengan HMI kembali muncul. Pada masa ini posisi menjadi terbalik, HMI adalah pihak yang ingin dibubarkan oleh PKI. Ini dibuktikan saat ceramah D.N. Aidit di depan masa dan *underbouw* PKI tanggal 13 Maret 1965, Ia mengatakan : “Seharusnya tidak ada keraguan untuk membubarkan HMI. Saya menyokong penuh tuntutan pemuda, pelajar dan mahasiswa yang menuntut pembubaran HMI” (Sitompul, 2008: 211).

PKI sangat gigih berusaha membubarkan HMI, kegigihan ini tidak terlepas dari keberadaan HMI yang menganut ideologi berlawanan dengan PKI dan tentu berbeda garis politik secara nasional. Pada saat itu PKI sebagai partai mempunyai kekuatan yang sangat besar, lebih dari 27 juta rakyat Indonesia dinyatakan sebagai anggota PKI atau organisasi-organisasi massanya (Ricklefs, 2007: 425). Dalam situasi ini HMI melakukan lobi politik melalui banyak tokoh yang bersimpati terhadap HMI, baik kalangan militer, politisi, maupun tokoh-tokoh agama (Sitompul, 2008: 211).

Pada tanggal 30 September malam – pagi 1 Oktober 1965 ketegangan meletus karena terjadinya suatu percobaan kudeta di Jakarta (Ricklefs, 2007: 425). Kudeta ini mengawali runtuhnya kekuatan PKI dan melahirkan gerakan mahasiswa yang diprakarsai oleh HMI bertujuan menumpas PKI dan menggugat kekuasaan Soekarno. Badan koordinasi aksi mahasiswa, yang terbentuk dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dimana HMI sebagai tulang punggungnya, dibentuk 25 Oktober 1965 dengan restu Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Penegetahuan (PTIP) dengan tujuan utama menumpas habis PKI (Sitompul, 2008: 215).

HMI pada saat itu didukung oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal, A.H. Nasution yang pada saat itu mempunyai pengaruh besar di dalam tubuh Angkatan Darat. Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung mulai bulan

Januari 1966 terus berlanjut dengan dukungan tentara, KAMI berseberangan dengan Soekarno yang tak kunjung menyampaikan “solusi politik” berkaitan dengan percobaan kudeta yang diduga dilakukan oleh PKI (Wardaya, 2009: 77).

HMI melalui KAMI pada saat itu menjadi salah satu kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan gerakan aksi mahasiswa, KAMI mengutarakan pokok perjuangan yang dituangkan dalam Tri Tuntutan Rakyat (disingkat; Tritura) yang meliputi: 1) pembubaran PKI untuk jangka pendek; konsekuensi logis untuk jangka panjang ialah pernyataan perang terhadap setiap bentuk dominasi kekuatan tertentu yang ingin memenangkan kehendak golongan tertentu; 2) penurunan harga, yang pada waktu pencetusan Tritura mempunyai esensi penurunan tingkat harga kebutuhan pokok sehari-hari secara nominal. Konsekuensi logis untuk jangka panjang ialah rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi; 3) pembubaran atau perombakan Kabinet Dwikora dengan sasaran jangka panjang berupa pemerintahan yang efisien, kompak dan efektif.

Menanggapi tuntutan mahasiswa pada tanggal 21 Februari 1966, Soekarno merombak Kabinet Dwikora dan mengantinya menjadi “Kabinet Dwikora yang disempurnakan”. Dalam kabinet ini Nasution dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, oleh Soekarno dua orang yang dicurigai terlibat dalam insiden berdarah 1 Oktober 1965 yakni Omar Dhani dan Soebrandio dipertahankan dalam Kabinet (Wardaya, 2009: 77). Melihat pencopotan Nasution dan dipertahankannya orang-orang “kiri” dalam kabinet mahasiswa malah merasa kecewa (Wardaya, 2009 : 77).

Hari pelantikan kabinet yakni tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa melalui KAMI dimana HMI menjadi penggeraknya mengadakan demonstrasi besar-besaran di seputar Istana Negara, sehingga sejumlah menteri harus datang dengan berjalan kaki atau menggunakan helikopter (Wardaya, 2009: 78). Dalam demonstrasi tersebut, terjadi bentrokan antara KAMI dan pasukan pengawal Istana Cakrabirawa yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas. Insiden ini membuat mahasiswa KAMI semakin berani dalam demo-demo mereka. Semangat dan disiplin mahasiswa kala itu sangat tinggi, mereka semakin jelas mengarahkan demonstrasi mereka ke arah Soekarno. Banyak sumber mengatakan bahwa

tembok-tembok di Bogor dan khususnya di rumah Hartini (istri Soekarno) dicoret-corei dengan tulisan yang menyatakan bahwa Hartini adalah “pelacur” (Wardaya, 2009: 65). Soekarno semakin geram dengan aksi mahasiswa yang dipelopori KAMI karena semakin mengarah pada dirinya, dalam pidatonya Soekarno sempat menyinggung pamflet yang menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa karena mahasiswa telah menuduhnya mendukung Gerakan 30 September (Wardaya, 2009: 66).

Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang dikeluarkan Soekarno tahun 1966 peristiwa dimana Soekarno memandatkan wewenang eksekutif kepada Soeharto merupakan awal terjadinya pergantian kekuasaan dari Soekarno menuju Soeharto. Dikeluarkannya surat perintah tersebut tidak terlepas dari tekanan demonstrasi mahasiswa kepada Soekarno untuk segera membenahi masalah yang termuat dalam tritura.

Kajian mengenai gerakan mahasiswa memang menarik untuk diketahui, mengingat mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam setiap episode panjang perjalanan bangsa ini. Hal ini tentu saja sangat beralasan mengingat bagaimana pentingnya peran mahasiswa yang selalu menjadi aktor perubahan dalam setiap momen bersejarah di Indonesia dan HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang mempunyai andil dalam dunia pergerakan mahasiswa di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuraikan, maka peneliti bermaksud mengangkat peristiwa tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul :

Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pada Masa Peralihan Pemerintahan Soekarno Menuju Soeharto (1965-1966).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah secara umum adalah “Bagaimana gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada masa peralihan pemerintahan Soekarno menuju Soeharto (1965-1966)?” adapun rumusan dan pembatasan masalah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi politik nasional antara tahun 1965-1966 ?

Sugeng Teza Bastaman, 2013

Gerakan himpunan mahasiswa islam (HMI) pada masa peralihan pemerintahan soekarno menuju soeharto

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Bagaimana proses peralihan pemerintahan Soekarno menuju Soeharto ?
3. Peristiwa-peristiwa penting apakah yang terjadi saat peralihan kekuasaan Soekarno menuju Soeharto?
4. Bagaimana Sikap HMI terhadap Soekarno tahun 1965-1966?
5. Bagaimana Sikap HMI terhadap Soeharto tahun 1965-1966?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada masa peralihan pemerintahan Soekarno menuju Soeharto (1965-1966). Adapun rincian tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan situasi politik nasional antara tahun 1965-1966
2. Mendeskripsikan proses peralihan pemerintahan Soekarno menuju Soeharto
3. Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat peralihan kekuasaan Soekarno menuju Soeharto
4. Mendeskripsikan bagaimana Sikap HMI terhadap Soekarno
5. Mendeskripsikan bagaimana Sikap HMI terhadap Soeharto

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian secara khusus yang penulis harapkan adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan referensi dalam mengetahui Sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia
2. Penelitian ini diharapkan menjadi media pengetahuan perjalanan mahasiswa pergerakan bagi seluruh mahasiswa
3. Penelitian ini diharapkan memberi semangat baru pada penulis dalam mempelajari dunia pergerakan mahasiswa

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini merujuk pada metode penelitian sejarah, sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005: 48-50), antara lain :

Sugeng Teza Bastaman, 2013

Gerakan himpunan mahasiswa islam (HMI) pada masa peralihan pemerintahan soekarno menuju soeharto

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Heuristik

Di dalam heuristik, peneliti mencoba mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut berasal dari sumber buku, hasil browsing internet dan wawancara.

2. Kritik

Setelah tahap mencari dan mengumpulkan sumber, berikutnya peneliti melakukan kritik atas sumber, yaitu dengan melakukan analisis terhadap sumber yang telah peneliti peroleh apakah sesuai dengan masalah. Pada tahap ini, kritik yang dilakukan dibagi menjadi dua, Eksternal dan Internal. Kritik Eksternal ditunjukan untuk melihat orientasi sumber. Dalam kritik Eksternal dipersoalkan tokoh yang menjadi sumber lisan, umur, daya ingat. Sedangkan dalam kritik Internal lebih ditunjukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan perbuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada tahap ini peneliti membandingkan isi dari buku satu dengan buku yang lainnya apakah ada kesesuaian dengan masalah yang peneliti angkat.

3. Interpretasi

Tahap yang ketiga adalah interpretasi, dalam tahap ini penelisi melakukan proses penafsiran dan menyusun makna kata-kata yang diperoleh setelah proses kritik sumber dengan cara menghubungkan satu fakta dengan yang lainnya sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang sejarah gerakan Himpunan Mahasiswa Islam. Di dalam Interpretasi juga terdapat eksplanasi yaitu penjelasan.

4. Historiografi

Tahap terakhir dalam metode historis adalah historiografi, yakni proses penelitian yang utuh dan masuk akal atas interpretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya mengenai Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pada Masa Peralihan Pemerintahan Soekarno Menuju Soeharto (1965-1966).

Adapun teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memakai studi Literatur. Studi Literatur merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dengan membaca berbagai sumber buku dan mencari sumber lewat browsing internet yang berhubungan, serta mengkaji sumber lain seperti artikel dan karya ilmiah lain yang mendukung penulisan karya ilmiah ini. Setelah sumber-sumber

ditemukan, dianalisis, ditafsirkan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (Ismaun, 1992: 125-131).

Dalam upaya mengumpulkan bahan untuk keperluan penyusunan proposal skripsi, penulis melakukan teknik penelitian dengan menggunakan studi literatur, teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian.

Pada penelitian skripsi ini, peneliti pun menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan dan wawancara, antara lain :

1. Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, majalah, dan koran dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang akan dikaji.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dan berdiskusi dengan pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penyusunan skripsi ini akan dilakukan beberapa wawancara, diantaranya dengan pengurus dan kader Himpunan Mahasiswa Islam angkatan tahun 1965-1966 yang saat itu memiliki andil dalam gerakan HMI.

Untuk selengkapnya, pembahasan mengenai metode dan teknik penelitian akan di bahas dalam bab III.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun menurut sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab ini merupakan kajian kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan dengan Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam pada masa peralihan pemerintahan Soekarno menuju Soeharto (1965-1966), Peneliti mereview untuk mengetahui sejauh mana

pembahasan karya-karya tersebut sehingga penelitian skripsi ini dapat melengkapi apa yang belum ada dari buku-buku tersebut.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini akan dibahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber, cara pengolahan sumber serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang dipakai adalah metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, sedangkan teknik penelitian menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan dan wawancara.

Bab IV Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam Pada Masa Peralihan Pemerintahan Soekarno Menuju Soeharto (1965-1966), pada bab ini akan mencakup tentang uraian yang berisi penjelasan-penjelasan terhadap aspek-aspek yang ditanyakan dalam perumusan masalah sebagai bahan kajian. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi lima sub pokok bahasan yang meliputi pembahasan mengenai, situasi politik nasional antara tahun 1965-1966, proses peralihan pemerintahan Soekarno menuju Soeharto, peristiwa-peristiwa penting apakah yang terjadi saat peralihan kekuasaan Soekarno menuju Soeharto, sikap HMI terhadap Soekarno, dan sikap HMI terhadap Soeharto.

Bab V Kesimpulan pada bab ini akan dikemukakan mengenai jawaban terhadap masalah-masalah secara keseluruhan setelah pengkajian pada bab sebelumnya.